PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DIDUKUNG

Sabtu, 13 Januari 2018 - Rizki Arrida

RENCANA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) disambut positif. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan mendukung pembentukan BPRS untuk memudahkan saluran pengaduan masyarakat, terutama bila kecewa dengan pelayanan rumah sakit.

"SEIRING dengan semakin bertambahnya jumlah rumah sakit, baik milik pemerintah maupun milik swasta, diperlukan Badan Pengawas Rumah Sakit. Agar hak dan kewajiban pasien bisa berjalan seimbang. Demikian juga dengan hak dan kewajiban rumah sakit itu sendiri. Termasuk menyangkut etika rumah sakit, etika profesi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur rumah sakit dan tindakan para medis. Bila ada BPRS, maka semua itu dapat diawasi dan masyarakat dapat melaporkannya kepada BPRS," papar Noorhalis Majid kepada jejakrekam.com, Sabtu (13/1/2018).

Menurutnya, bagi Ombudsman sendiri, keberadaan BPRS akan sangat membantu tugas dan tanggungjawab Ombudsman. Berarti akan ada pengawas ekternal yang khusus mengawasi rumah sakit. "Nantinya bila masyarakat ada yang melaporkan layanan rumah sakit, maka Ombudsman bisa langsung mengkomunikasikannya kepada BPRS, sehingga BPRS dapat mengambil tindakan," ujar jebolan STIE Indonesia ini.

Mengingat pembentukan BPRS melalui proses seleksi, Majid mengatakan Ombudsman berharap seleksinya berjalan dengan jujur, adil, transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. "Sebab, BPRS adalah pengawas ekternal, wakil dari masyarakat. Pun begitu terhadap pengurus BPRS nantinya, semoga terpilih orang-orang yang memahami layanan rumah sakit, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas, termasuk melakukan mediasi dan memberikan rekomendasi kepada rumah sakit yang dikeluhkan," tandas mantan Ketua Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin ini.(jejakrekam)

Penulis : Ahmad Husaini

Editor : Didi G Sanusi

Foto : Didi GS